

**ANALISIS PENDAPAT IBNU QOYYIM AL - JAUZIYYAH
TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS
DALAMPERKAWINAN**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - tugas dan Syarat - syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Pada
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



OLEH :

TITO HARTOTO
NIM. 10821001751

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN AHWAL AL - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

DRS. YUSRAN SABILI, M.A
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

Pekanbaru, 06 Mei 2013

Nomor : Nota Dinas Lam : - Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Tito Hartoto	Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Di - Pekanbaru
--	---

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi atas nama **Tito Hartoto** yang berjudul "**Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan**" telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu yang dekat, saudara **Tito Hartoto** dapat dipanggil dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Wassalam
 Dosen Pembimbing

DRS. YUSRAN SABILI, M.Ag
NIP. 19650313 199203 1 003

ABSTRAK

Salah satu ketentuan yang diharapkan dapat membawa kepada tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya persetujuan atau kebebasan anak gadis dalam menentukan calon suaminya.

Ternyata di kalangan fuqaha' terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada dua kubu. Kubu pertama menyatakan bahwa persetujuan hukumnya hanya sekedar sunat, tanpa ada persetujuan pun, perkawinan tetap sah.

Sedangkan kubu lain berpendapat persetujuan adalah sesuatu yang menentukan (wajib). Artinya apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinan batal alias tidak sah. Pada golongan pertama termasuk Imam Syafi'i yang mana pendapatnya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan di golongan kedua diikuti oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah yang juga merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan bahan hukum primer Kitab *Zadul Ma'ad*, dan *I'lam al - Muwaqqi'in* dengan menggunakan metode deskripsi dan Metode Content Analisis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibnu Qayyim al - Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan bagaimana Metode Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al - Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan bagaimana analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al - Jauziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah dengan mayoritas fuqaha' adalah karena Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan *mantuq nas* (makna eksplisit) yang dikuatkan dengan Qiyas dalam *istinbat* hukumnya. Sementara mayoritas fuqaha' menggunakan *mafhum*

mukhalafah (makna implisit) dalam *istinbat* hukumnya yang dikuatkan dengan memakai '*illat al-bikr*.

Penelitian yang dilakukan penyusun juga memberikan jawaban bahwa pendapat Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah tersebut sejalan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

PERSEMBAHAN

Suasana larut menghangut fikirku akan sebuah perjuangan, sakit, sesak, sibuk, suntuk, perih, letih, sedih, terbayar dengan sebuah toga....

Lentik jemari menengada, nafas tertahan tertekan, air mata berurai menghujani sejada seolah-olah sebuah mimpi dia telah memberikan mimpi yang hakiki....

Perlahan, kurenungi sejenak akan sikap yang tak beradat, akan kata yang tak tertata, akan tingkah yang tak berwibawa, akan perbuatan yang tak bersopan, namun mereka selalu balas dengan senyuman....

Aku tak tau berapa yang telah kuhabiskan, aku tak tau dari mana mereka dapatkan, aku tak tau dengan cara apa mereka dapatkan, yang aku tau mereka tak perna mengeluh saat matahari membakar kulitnya yang mulai keriput karena bersahabat dengan alam, merka tak perna menyerah saat hujan menyiram tubuh yang kian lemah dibantai usia, mereka tak perna menggugat saat menyuap dengan seadanya, demi.....
Aku anaknya

Ayah.....

Bunda.....

Sangat memuaskan ku ini, mungkin bisa membuat senyummu kembali tersungging, walau ku tahu perjuanganmu tak sebanding dengan apa yang bisa kupersembahkan....

Aku anakmu yang akan selalu ada untukmu....

Aku anakmu yang akan mengisi kebahagiaan hari-hari tuamu....

Aku anakmu yang akan selalu mengangkat tangan jari sepuluh untukmu....

By : Tito Hartoto

KATA PENGANTAR

ﷻ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﯿﻦ . ﻭﺍﻓﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﯿﻦ .
 ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﺩﯨﻨﻪ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻠﺤﯿﻦ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺍﺻﺤﺎﺑﻪ
 ﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺷﺮﯨﻌﺘﻪ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ .

Rasa syukur yang sedalam dalamnya kupanjatkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Swt yang senantiasa melindungi dan menjagaku serta keluargaku dari hal-hal yang mungkin membahayakan diriku dan keluargaku.

Shalawat dan salam penulis haturkan dan persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Mudah-mudahan syafaat beliau akan selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada kita sebagai umatnya pada yaumul Mahsyar nanti.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak dan komponen. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh komponen pendukung dalam penulisan skripsi ini mulai dari gagasan sampai tahap penyelesaian skripsi. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Muslim dan ibunda Hafsah (Alm) dan kedua kakanda Wiji Rahayu dan Sari Hartati serta adinda Sarina yang saya cintai dan sayangi.

2. Yang terhormat bapak Prof.DR.M.Nazir Karim, MA (Selaku Rektor), bapak Prof.DR.H.Munzir Hitami, MA (Selaku pembantu Rektor I), bapak Prof.DR.H.Ilyas Husti, MA.M.Pd (Selaku Pembantu Rektor II) dan bapak Drs. Promadi, M.Pd.P.hd (Selaku Pembantu Rektor III) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat bapak DR.H.Akbarizan, MA.M.Pd (Selaku Dekan), Ibu DR.Hertina, M.Pd (Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Kastulani, SH. MH (Selaku Pembantu Dekan II), bapak Drs.Ahmada Darbi B, M.Ag (Selaku Pembantu Dekan III), Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah memberikan sumbangan ilmu kepada Penulis serta seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Yang terhormat bapak Drs.Yusran Sabili MA. sebagai ketua Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyyah sekaligus pembimbing Skripsi penulis.
5. Yang terhormat bapak kepala Pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan secara materil maupun moril terutama lokal AH I (satu).
7. Kepada teman – temanku, Nurdalila, Khoiri, bang Arif Kusmaja, Natiar, Syamsuddin, Iwan dan Ahmad Mustafa.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang ikut serta menyukseskan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka suatu harapan yang diinginkan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan.

Pekanbaru, 23 Mei 2013
Penulis

TITO HARTOTO

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II BIOGRAFI IBNU QOYYIM AL – JAUZIYYAH

A. Riwayat Hidup Ibnu Qayyim al – Jauziyah.....	12
B. Guru dan Murid Ibnu Qoyyim al – Jauziyyah.....	16
C. Karya - karya Ibnu Qayyim al – Jauziyah.....	17

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ATAU

PERNIKAHAN

A. Pengertian nikah.....	22
B. Dasar Hukum	23

C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
D. Hal - hal yang membatalkan perkawinan.....	30
E. Asas - asas persetujuan dalam Pernikahan.....	31
F. Pendapat ulama tentang persetujuan anak gadis.....	34

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU QOYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN

A. Ibnu Qayyim Al – Jauziyah Sependapat Dengan Imam Abu Hanifah, sedangkan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah Bermazhab Imam Hambali.....	42
B. Metode Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al – Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.....	51
C. Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al – Jauziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Pernikahan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

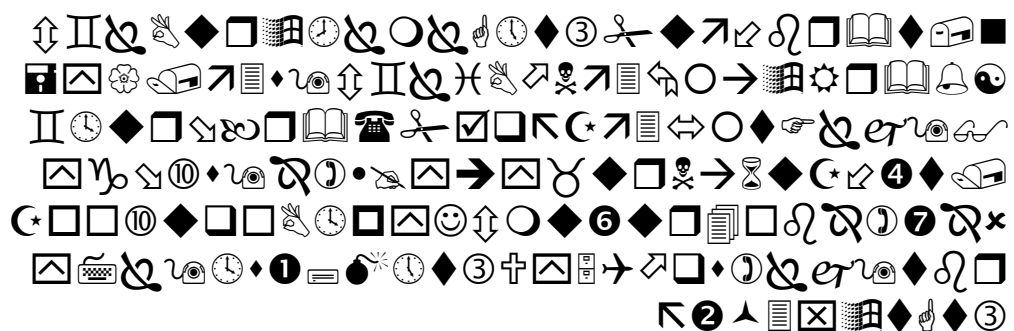
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹

Mengenai hakikat perkawinan itu sendiri, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut, Perkawinan hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat (misaqan galiza) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian disebutkan dalam pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah².

Hal ini sesuai dengan firman Allah:



¹Mahmud Asy-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), Cet. III, h., 23

²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), h., 180

Artinya: Dan di antara tanda - tanda kekuasaan - Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri - istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan - Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berpikir, (Q.S Ar – rum: 21) ³.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

Mahmud Syaltut dalam bukunya Akidah dan Syari'ah Islam menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pranikah:

- a. Saling mengenal dan memahami (*at-Ta'aruf*) di antara kedua mempelai. Dengan proses saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini Islam mewasiatkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan adalah kebaikan akhlak dan agama serta tidak semata-mata memandang keadaan fisik, harta dan keturunan.
- b. *Al-Ikhtibaryaitu* tahap penjajakan yang dilaksanakan dengan melakukan khitbah. Dalam khitbah ini calon suami diperbolehkan melihat wajah, tangan dan telapak kaki si wanita dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk mengetahui pemikiran masing-

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta:PT. Syamil Cipta Media, 2005), h., 507

masing. Dari pelaksanaan khitbah ini diharapkan timbul rasa suka pada masing-masing calon mempelai.

- c. *Ar-Rida*(kerelaan),disini syari‘t Islam tidak mencukupkan pada dua prinsip di atas semata namun juga mengharuskan adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai.
- d. *Kafa’ah* yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga.
- e. Mahar atau mas kawin, dalam mahar ini syari‘at mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar⁴.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (*Ar-Rida*)merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia.

Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syafi‘i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib.

Lain halnya kalau persetujuan datangny dari anak gadis menurut ulama Syafi‘iah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama Syafi‘iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua

⁴Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari‘at Islam*, alih bahasa Fahrudin HS., (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Cet. III, h., 157-163.

dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan⁵.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafiberpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya, kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya⁶. Diisi lain, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang sudah baliq dan berakal boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri.

Mazhab Hanbalimensikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun

⁵Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. II, h., 467.

⁶Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), Cet I, h., 79

perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak *ijbar* bagi wali.

Berbeda halnya dengan Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa wali mujbir tidak boleh menikahkan baik gadis maupun janda sudah dewasa tanpa persetujuan si wanita. Jika pernikahan tersebut dilanjutkan, maka akad perkawinan tersebut dihukumi dengan *fasid* dan harus dilakukan *fasakh*⁷.

Sementara itu Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut dalam karyanya *Zad al-Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahkannya.

Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur *salaf* dan mazhab Hanafi serta satu riwayat dari Imam Ahmad⁹.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mazhab Hanbali mayoritas berpendapat persetujuan anak gadis sekedar sunat atau penyempurna, tetapi beliau berani berbeda pendapat.

⁷ Syaikh Al – Amam Muhammad bin Abdurrahman Ad – Damsyqi, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyim, 2012), Cet. III, h., 248

⁸ *Ibid.*

⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir: Mustafaal-Babi al-Halabiwa Awladih, 1390/ 1970), Cet. IV, hal., 67

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Berangkat dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syafi'iah yang nota bene yang menganggap persetujuan tidak begitu penting (sunnat), sementara dalam Undang – undang perkawinan dan KHI menyatakan adanya persetujuan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al – Juziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan**”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang berhubungan dengan Perkawinan dalam Islam merupakan permasalahan yang sangat beragam. Oleh karena itu, untuk

menghasilkan tingkat validitas yang tinggi dan mendalam, serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan finansial, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini difokuskan kepada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas. Permasalahan tersebut adalah:

1. Mengapa Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah sependapat dengan Imam Abu Hanifah, sedangkan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah dan gurunya Ibnu Taimiyyah bermazhab Hambali ?.
2. Bagaimana Metode Istimbath hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al - Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?.
3. Bagaimana Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al – Juziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan ?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui mengapa Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah sependapat dengan Imam Abu Hanifah, sedangkan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah dan gurunya Ibnu Taimiyyah bermazhab Hambali.

- b. Untuk mengetahui Metode Istimbath hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana analisis pendapat Ibnu Qoyyim Al – Juziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.
2. Adapun Manfaat dari penelitian adalah:
- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam tentang hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan hukum persetujuan anak gadis dalam perkawinan.
 - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fikih secara umum, masalah persetujuan anak gadis dalam perkawinan khususnya.
 - c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara

mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data primer tidak dipakai, dan yang dipakai adalah data skunder. Yang mana data skunder diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat yakni: Kitab *Zadul Ma'ad*, dan *I'lam al-Muwaqqi'in*
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu: Fikih Sunnah, Fikih Lima Mazhab, Bidayatul Mujtahid, dan kitab-kitab fikih lainnya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup: Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. Diantaranya : Kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedia.

3. Metode Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek. Metode ini digunakan terutama pada

pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

- b. Metode Content Analisis yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki. Metode ini akan penulis gunakan pada Bab IV, yaitu pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II BIOGRAFI IBNU QOYYIM AL – JAUZIYYAH

- A. Riwayat Hidup Ibnu Qayyim al – Jauziyah
- B. Guru – Guru dan Murid – Murid Ibnu Qoyyim al – Jauziyyah
- C. Karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ATAU PERNIKAHAN

- A. Pengertian nikah
- B. Rukun dan syarat perkawinan
- C. Hal - hal yang membatalkan perkawinan
- D. Asas - asas persetujuan dalam Pernikahan
- E. Pendapat ulama tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU QOYYIM AL – JAUZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN

- A. Ibnu Qayyim Al – Jauziyah Sependapat Dengan Imam Abu Hanifah, sedangkan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah Bermazhab Imam Hambali.
- B. Metode Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al – Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.
- C. Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al – Jauziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Pernikahan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

BAB II

BIOGRAFI IBNU QAYYIM AL – JAUZIYYAH

A. Riwayat Hidup Ibnu Qoyyim Al - Jauziyyah

Ibnu Qayyim al - Jauziyah lahir di Damascus, 6 Safar 691 H /29 Januari 1292 - Damascus, 23 Rajab 751H/26 September 1350 M). Ibnu Qayyim, al Jauziyah adalah seorang ahli usul - fikih dan ahli hadits kenamaan. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Ayyub ibnu Sa'ad ibnu Hariz az - Zar'i ad - Dimasyqi, yang dijuluki dengan sebutan Syamsud - Din (Matahari agama). Lahir pada 751 (691 H) di Damascus, dan di negeri itu ia dibesarkan. Dari kecilnya, seperti dilukiskan oleh Mustafaal - Maragi dalam kitabnya al - Fath al - Mubin, sudah terkenal sebagai seorang yang sangat tabah dan tekun dalam menghadapi sesuatu masalah. Masyarakat pada masanya mengenalnya sebagai seorang alim yang taat, banyak shalatnya dan sangat gemar membaca al - Quran. Diriwayatkan bahwa tiap - tiap selesai salat subuh, ia tetap duduk di atas sajadahnya mengerjakan zikir sampai terbit matahari. Ia adalah seorang alim yang rendah hati seperti dicatat oleh Syekh al - Maragi, sangat penyayang kepada sesama manusia dan mukanya selalu manis di hadapan sesamanya. Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam agama akan dapat dicapai. Seseorang yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah Swt hendaklah mempunyai. Cita - cita

yang tinggi, karena citacita yang tinggi itu dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi – Nya ¹⁰.

Banyak keahlian Syekh pembela mazhab salaf ini. Di samping sebagai ahli usul fikih, ushuluddin dan ahli hadits, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa Arab, seorang sastrawan, juru dakwah kenamaan dan bicaranya sangat menarik dan memukau siapa yang mendengarnya. Lamendalami berbagai cabang ilmu dari ulama - ulama kenamaan di Damascus. Bahasa Arab ia dalami dari ahli - ahli bahasa Arab kenamaan, seperti Syekh Abu al - Fath dan al - Majd at - Tunisi. Di bidang fikih ia belajar dari Syekh al - Majd al - Harrani. Ilmu faraid ia pelajari dan dalami dari ayahnya Abu Bakar ibnu Ayyub dan ilmu usul - fikih ia dalami dari Syekh as - Safi al - Hindi dan Syekh al - Islam Ibnu Taimiyah. Cabang - cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya ia pelajari dari Syekh at - Taqi Sulaiman, Syekh Abu Bakar ibnu Abdud - Daim dan Syekh al - Mut'im.

Ia sangat dekat dengan Syekh al - Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. Ia terkenal gigih dalam membela dan menyebarkan pemikiran - pemikiran gurunya itu. Ibnu Qayyim, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini. Dalam menyampaikan kebenaran yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya dari apa yang dialami oleh

¹⁰ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992), h., 374

gurunya Ibnu Taimiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan ¹¹.

Di samping mengajar di sebuah sekolah yang terkenal di Damascus, Madrasah as - Sadriyah, dan sebagai imam dan khatib menggantikan ayahnya di salah satu mesjid di kota itu, kegiatan ilmiah yang paling disenangi dari ditekuninya ialah menulis karya - karya ilmiah dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya cukup menjadi bukti akan kedalaman ilmunya. Di antara kitabnya yang paling terkenal ialah I'lam al - Muwaqqi'in 'am Rabb al - 'Alamin, yang terdiri dari empat juz dalam dua jilid. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam usul fikih, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui fakta - fakta elastisitas hukum Islam. Dalam bidang tauhid dantasawuf antara lain ia mengarang kitab Madarij as - Sdlikin baina Manazillyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in. Kitab ini terdiri dari tiga juz dan secara mendalam membicarakan tauhid dan tasawuf. Kemudian kitab ar - Ruh yang membentangkan kehidupan sesudah mati lengkap dengan dalilnya, kitab at - Turuq al - Hukmiyyah yang menguraikan soal - soal siyasat syariah dan kitab Zad al - Mi'ad fi Huda Khair al - 'Ibad dalam bidang hadits. Ibnu Qayyim al - Jauziyah wafat pada 1349 (751 H) di kota tempat kelahirannya Damascus dan dikuburkan di tanah pekuburan wakaf al - Bab as - Sagir, di pinggir kota tersebut ¹².

¹¹ *Ibid.h.*, 374

¹² Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Enam Puluh Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h., 830

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersifat pembaharuan. Tak terkecuali dalam bidang Tasawuf. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menghendaki agar Tasawuf dikembalikan ke sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan as-sunnah dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ajaran-ajaran Tasawuf seharusnya memperkuat Syari'at dengan itu beroleh kesegaran dan penghayatan hakiki yang tumbuh dari kedalaman batin manusia¹³.

Gelora pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang tegas dengan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat, dapat dipahami apabila kita melihat situasi dan kondisi masyarakat dimana Ibn Qayyim al-Jawziyyah hidup. Di timur Hulaghu Khan datang mengobrak-abrik umat Islam dan dari barat kekuatan-kekuatan yang membentuk perang salib, sementara Aqidah dan pemikiran umat Islam dalam keadaan beku (*jumud*) dibalut oleh lumpur taklid, khurafat dan bid'ah.¹⁴

Pendapat yang ditimbulkan di zaman disintegrasi bahwa pintu Ijtihad telah ditutup dan diterima secara umum di zaman tersebut. Disamping itu, pengaruh tarekat-tarekat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Demikianlah kehidupan yang melanda orang Islam pada masa itu, penuh dengan bentrokan fisik dan perpecahan sesama mereka, disebabkan mereka menyimpang dari ajaran agama.

¹³M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, h., 222

¹⁴*Ibid.h.*, 223

Keadaan seperti ini membutuhkan terjadinya perubahan dan pembaharuan kesempatan seperti inilah yang paling tepat untuk mengajak dan mengarahkan bangsa kembali kepada ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong Ibn Qayyim al- Jawziyyah untuk menegakkan dakwah perdamaian, mempersatukan paham Aqidah dan Fiqh, membuang pertikaian sesama orang Islam serta membuka kembali pintu ijtihad dengan tetap atau selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as – sunnah ¹⁵.

B. Guru - guru dan Murid – murid Ibnu Qoyyim Al - Jauziyyah

Adapun guru-gurunya Ibnu Qoyyim Al – Jauziah adalah sebagai berikut :

1. Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al –Jauzi
2. Ibnu Abdiddaim
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
4. Asy – Syihab Al – Abir
5. Ibnu Asy – Syirazi
6. Al - Majd Al – Harrani
7. Ibnu Maktum
8. Al - Kuhhali,
9. Al - Baha' bin Asakir
10. Al - Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al - FadI bin Hamzah
11. Juga Syarafuddin bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam

¹⁵*Ibid.*, .h., 225

12. Al - Mutha'im
13. Fathimah binti Jauhar
14. Majduddin At – Tunisi
15. Al - Badar bin Jama'ah
16. Abu Al - Fath Al - Ba'labaki
17. Ash - Shaf Al – Hindi
18. Az – Zamlakani
19. Ibnu Muflih dan
20. Al – Mizzi ¹⁶.

Adapun murid – murid Ibnu Qoyyim Al - Jauziyyah adalah:

1. Al - Burhan bin Al - Qayyim Al - Jauzi, anaknya bernama Burhanuddin
2. Ibnu Katsir
3. Ibnu Rajab
4. Syarafuddin bin Al - Qayyim, anaknya bernama Abdullah bin Muhammad
5. As – Subki
6. Ali bin Abdulkafi bin Ali bin Tamam As – Subki
7. Adz – Dzahabi
8. Ibnu Abdulhadi
9. An – Nablusi
10. Al - Ghazi dan
11. Al - Fairuz Abadi Al - Muqri ¹⁷.

¹⁶Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al – Salaf, Op.Cit.*, h., 831

C. Karya – Karyanya Ibnu Qoyyim Al - Jauziyyah

Adapun karya –karya Ibnu Qyyim al – Jauziyyah adalah sebagai berikut :

1. Ijtima' Al - Juyusy Al - Islamiyah 'ala Ghazwil Mu'aththalah wa Al - Jahmiyah. Dicitak di India pada tahun 1314 Hijriyah, kemudian dicitak di Mesir pada tahun 1351 Hijriyah.
2. Ahkam Ahli Adz - Dzimmah. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shubhi Ash - Shalih dalam dua jilid.
3. Asma' Mu'allafat Ibni Taimiyah. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin Al - Munjid.
4. Ilam Al - Mu'waqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Dicitak dengan empat jilid oleh Mathba'ah Al - Muniriyah dan Mathba'ah As - Sa'adah.
5. Ighatsah Al - Lahfan min Mashayid Asy - Syaithan. Dicitak beberapa kali dalam dua jilid.
6. Ighatsah Al - Lahfan fi Hukmi Thalaq Al - Ghadhban. Dicitat dengan ditahqiq oleh Muhammad Jamaluddin Al - Qasimi.
7. Badai' Al - Fawaid. Dicitak di Mesir oleh Mathba'ah Al – Muniriyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.
8. At - Tibyan fi AqsamAl - Qur'an. Dicitak beberapa kali.
9. Tuhfah Al - Maudud fi Ahkam Al - Maulud. Dicitak beberapa kali dan dua di antaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul

¹⁷*Ibid.*, h., 832

Hakim Syarafuddin Al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua adalah dengan ditahqiq Abdul Qadir Al -Amauth pada tahun 391 Hijriyah.

10. Tahdzib Mukhatashar Sunan Abi Dawud. Dicitak dengan Mukhtashar Al - Mundziri dan syarahnya Ma'alim As - Sunan karya Al – Khithabi dalam delapan jilid.
11. Jala' Al - Ifham fi Shalah wa As - Salam 'ala Khairil Anam.
12. Hadi Al - Arwah ila Bilad Al - Afrah. Dicitak di Mesir beberapa kali.
13. Hukmu Tarik Ash – Shalah. Dicitak di Mesir beberapa kali.
14. Ad - Da' wa Ad - Dawa'. Dicitak dengan nama Al - Jflivab Al - Kafi liman Sa'ala 'am Ad - Dawa' Asy - Syafi.
15. Ar - Risalah At - Tabukiyah. Dicitak oleh Mathba'ah As - Salafiyah di Mesir pada tahun 1347 Hijriyah.
16. Raudhatul Muhibbin wa Nuzhah Al - Musytaqin. Pertama kali dicitak oleh Mathba'ah As - Sa'adah di Mesir pada tahun 1375 Hijriyah.
17. Ar - Ruh. Dicitak beberapa kali.
18. Zad Al - Ma'adfi Hadyi Khairil Ibad. Dicitak beberapa kali dalam empat jilid dan akhir pencetaannya dalam lima jilid.
19. Syifa' Al - 'Alil fi Masa'il Al-Qadha' wa Al - Qadar wa Al - Hikmah wa At - Ta'lil. Dicitak dua kali.
20. Ath - Thib An - Nabawi. Dicitak dua kali. Kitab ini merupakan nukilan dari kitab Zad Al - Ma'ad.
21. Thariq Al - Hijratin wa bab As - Sa'adatain. Dicitak beberapa kali.

22. Ath - Thuruq Al - Hakimahfi As - Siyasah Asy - Syar'iyyah. Dicitak beberapa kali.
23. 'Iddah Ash - Shabirin wa Dakhirah Asy - Syakirin. Dicitak beberapa kali.
24. Al - Furusiyah. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Al - Furusiyah Asy - Syar'iyyah.
25. Al - Fawaid. Kitab ini lain dengan kitab Badai' Al - Fawaid. Pertama kali dicetak di Mathba'ah Al - Muniriyah.
26. Al - Kafiyah Asy - Syafiyah fi Al - Intishar li Al - Firqah An - Najiyah. Dicitak beberapa kali. Kitab ini lebih terkenal dengan nama An - Nuniyah
27. Al - Kalam Ath - Thayyib wa Al - 'Amal Ash - Shalih. Dicitak beberapa kali. Di Mesir dan India dengan nama Al - Wabil Ash - Shayyib min Al - Kalam Alh - Thayyib.
28. Madarij as - Salikin baina Manazil lyyaka Na'budu wa lyyaka Nasta'in. Dicitak dua kali dalam tigajilid dengan nama ini. Kitab ini merupakan syarah kita Manazil As - Sairin karya Syaikhul Islam Al - Anshari.
29. Miftah Dar As - Sa'addh wa Mansyur Wilayah Al - Ilmi wa Al - Iradah. Dicitak beberapa kali. Dalam kitab ini dibahas tentang ilmu dan keutamaannya, dibahas tentang hikmah Allah dalam membuat makhluk, hikmah adanya syariat, dibahas tentang ke-Nabian dan kebutuhan akan adanya Nabi.
30. Al - Manar Al - Muniffi Ash - Shahih wa Adh - Dha'if. Dicitak beberapa kali. Dan sekali dicetak dengan nama Al - Manar.

31. Hidayah Al - Hiyari fi Ajwibah Al - Yahud wa An - Nashara. Dicitak beberapa kali.
32. Safar Hijrataan wa Bab Sa'adatain (satu jilid besar).
33. Uqad Muhkam al - Ahiqaa' bainal - Kali math - Thayyib wal - 'Amalis Saleh al - Marfuu' ila Rabbis - Samaa' (satu jilid besar).
34. Syarhu Asmaa'il – Kitabil - 'Aziz (satu jilid).
35. Zaadul - Musaafirun ila Manaazilis Suadaa'fi Hadyi Khatimil - Anbiyaa' (satu jilid).
36. Hallul - Afhaam fi Dzikrish - Shalaat was - Salaam 'Ala Khairil Anaam.
37. Bayaanud - Daliil 'alaa Istighnaail - Musaabaqah 'anit - Tahliil (satu jilid)

¹⁸*Ibid.*, h.,832 - 834

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERKAWINAN ATAU PERNIKAHAN

A. Pengertian

Nikah atau Perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut dengan Nikah() dan zawaj ()¹⁹. Secara etimologi (harfiah) nikah memiliki banyak arti yaitu "hubungan jenis kelamin" (), "bergabung" () "mengumpulkan" () dan juga "akad" ()²⁰.

Definisi yang sama diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu perkawinan adalah, akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya²¹.

Menurut Ulama Salaf nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya²².

Menurut undang – undang nomor 01 tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. III., h., 35 - 36

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 42-43

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dara al - Fikr, tt), Juz VII, h., 23

²² Zakiyah Darajad, dkk. *Ilmu fiqh*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 1990), Jilid II, h., 98

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²³.

Moh. Rifa'i menyebutkan pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki - laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan - ketentuan syari'at agama Islam²⁴.

Menurut Muhammad Amin Al - Kurdi memberikan pengertian nikah sebagai Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya²⁵.

Sedangkan menurut Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah yaitu akad yang terkenal dan mengandung beberapa rukun dan Syarat²⁶.

B. Dasar Hukum

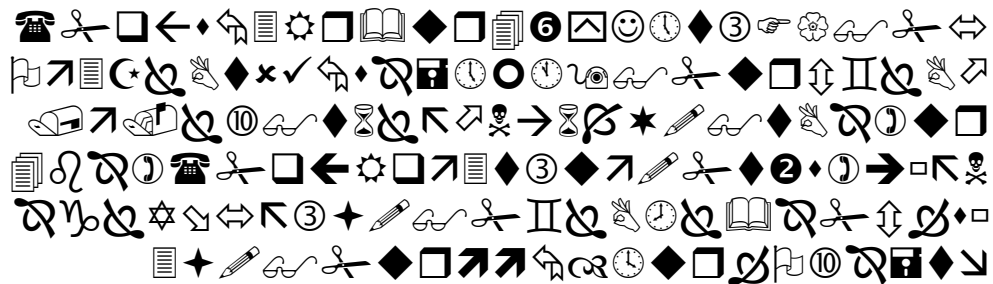
²³ Pustaka Yustisia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009).

²⁴ Drs. Moh Rif'ai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978), h., 483

²⁵ Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h., 373

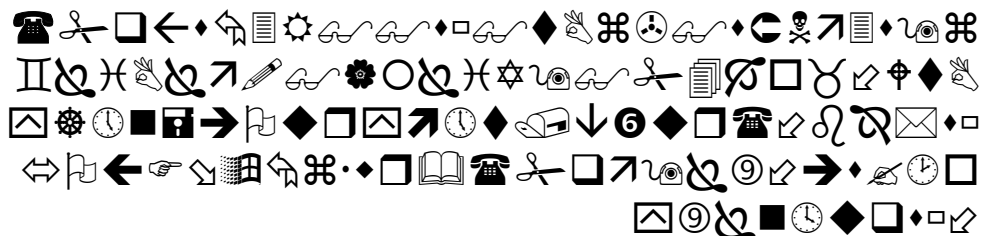
²⁶ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Darul Ihya Kutubil Arabiyah, tt), h., 36.

Banyak ayat – ayat Al –Quran maupun hadits Rasulullah Saw yang menganjurkan atau mendorong untuk menikah. Firman Allah Swt yang berbunyi :



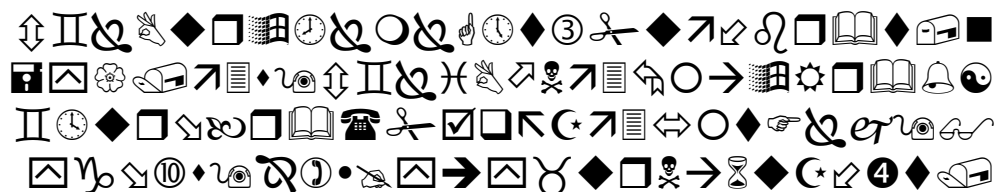
Artinya: Dan kawinkanlah orang - orang yang sendirian di antara kamu, dan orang - orang yang layak (berkawin) dari hamba - hamba sahayamu yang lelaki dan hamba - hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia - Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian - Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An - nur: 34) ²⁷.

Firman Allah Swt. surat An – nisa disebutkan :



Artinya: Maka kawinilah wanita - wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (Q.S An – nisa: 4) ²⁸.

Dan juga firman Allah Swt dalam surat Ar - rum :



²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil, 2005), h., 507

²⁸*Ibid.*, h., 77

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada :

يَا أَهْلَ الْبَيْتِ
() أَهْلَ الْبَيْتِ

Artinya: Wahai kaum pemuda! Barang siapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu. (HR. Bukhori dan Muslim) ³¹.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal fasid. Akad perkawinan dikatakan sah apabila akad tersebut dilakukan dengan syarat – syarat dan rukun – rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan – ketentuan agama. Yang termasuk dalam syarat akad ialah:

1. Kesanggupan dari calon – calon mempelai (pria dan wanita) untuk melaksanakan akad nikah.
2. Calon mempelai bukanlah orang – orang yang terlarang melaksanakan perkawinan. Larangan perkawinan ini ada yang untuk selama – lamanya dan ada yang dalam waktu – waktu tertentu saja, sesuai dengan keadaan orang – orang yang akan kawin.

³¹Abu Malik Kamal bin As - S ayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h., 107

3. Calon mempelai adalah orang yang sejdoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya³².

4.

Yang dimaksud dengan rukun akad, ialah segala macam hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad. Adapun rukun dan syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut³³:

1. Mempelai laki - laki, syarat - syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki – laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Mempelai perempuan, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
3. Adanya Wali Nikah

³²Muhammad Nasiruddin Al – Albani, *Mukhtasor Shohih Bukhori*, (Riyad: Pustaka Al – Ma’arif, tt), h., 2039

³²Abu Malik Kamal bin As - S ayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h., 107

³³Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al - Husaini, *Op.Cit.*, h., 50

Dari sekian banyak syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, wali adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Adapun syarat - syarat wali adalah sebagai berikut:

- a. Laki – laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Dalam soal pernikahan, yang pertama kali berhak menjadi wali adalah wali aqrab (bapak atau kakek), jadi selama wali aqrab masih ada, hak menikah belum dapat dipindahkan kepada wali yang lain (wali ab'ad). Apabila wali aqrab masih ada dan memenuhi syarat tetapi yang menikah wali ab'ad, maka nikahnya tidak sah ³⁴.

4. Adanya Saksi

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah, jika ketika berlangsungnya ijab-qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah ³⁵.

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a. Minimal dua orang laki – laki
- b. Hadir dalam Ijab Qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam

³⁴ *Ibid.*, h., 52

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz.II, h., 48- 49

e. Dewasa.

5. Ijab Qabul

Rukun yang mendasar dalam pernikahan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan, dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridhadan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad ³⁶.

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya dan qabul ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya ³⁷. Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

2. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
3. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
4. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
5. Antara ijab dan qabul bersambungan
6. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
7. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram Haji dan umrah

³⁶*Ibid.*, h., 49-50

³⁷Moh. Anwar, *Ibid.*, h., 126

8. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi ³⁸.

6. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan nama maskawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari calon mempelailaki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan hak istri dansunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung ³⁹.

Jadi pemberian maskawin ini wajib dan sunnah apabila disebutkan pada waktu akad nikah ⁴⁰. Namun apabila maskawin itu tidak disebutkandalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (mahar mitsil) ⁴¹.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul ⁴².

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h., 71 - 72

³⁹ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi agama, 1985), Cet. h., 109.

⁴⁰ *Ibid.* h., 110

⁴¹ *Ibid.* h., 114

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), h., 207

D. Hal – Hal Yang Membatalkan Perkawinan

Suatu perkawinan dikatakan batal apabila kurang atau tidak sempurna salah satu dari syarat – syarat atau rukun – rukun akad. Perkawinan yang berikut dianggap fasid apabila :

- a. Perkawinan tanpa saksi
- b. Perkawinan dengan seorang yang dalam iddah
- c. Perkawinan yang terlarang karena perbedaan agama, bertentangan dengan hukum peraturan hubungan ganda yang tidak sah
- d. Perkawinan dengan istri kelima ⁴³.

E. Asas-Asas Persetujuan Dalam Pernikahan

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ditentukan prinsip-prinsip dan asas pernikahan yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan, maka asas-asas dan prinsip-prinsipnya di kemukakan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Enam prinsip asas dalam undang - undang perkawinan itu adalah :

- a. Asas saling membantu dan melengkapi

Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing - masing

⁴³ Kamal Muchtar, *Op.Cit.*, h.,25

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Asas legalitas

Yaitu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaan dan di samping masing - masing perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Asas monogami

Yaitu perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri, hal ini bukan berarti bahwa perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri ditutup sama sekali kemungkinannya. Perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang masih dimungkinkan, apabila dikehendaki yang bersangkutan yang mengizinkannya. Meskipun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dikehendaki oleh yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Kedewasaan

Ialah bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, agar supaya dapat melangsungkan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur apabila diingat bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan

masalah kependudukan, yang merupakan batas umur yang merupakan masalah nasional kita. Maka UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas umur kawin untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki - laki batas umur untuk kawin 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.

e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

Telah diterangkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, maka Undang - undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi apabila dipenuhinya alasan - alasan tertentu yang terdapat dalam perundang - undangan serta dilakukan di depan pengadilan, sedangkan sidang pengadilan sendiri memberikan nasihat agar suatu perceraian dapat digagalkan sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

f. Asas keseimbangan

Maksudnya adalah hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian maka segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan. Undang - undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat I UU. Perkawinan tahun 1974 berbunyi, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai maksud

agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua mempelai yang telah melaksanakan pernikahan tersebut tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun. Ketentuan di atas sejalan dengan KHI yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan persetujuan calon mempelai, sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat nikah (PPN) harus menanyakan kepada mereka sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI :

1. Sebelum berlangsungnya pernikahan, pegawai pencatat nikah harus menanyakan terlebih dahulu persetujuan mempelai di hadapan dua saksinikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti ⁴⁴.

F. Pendapat Ulama Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan

Diantara pendapat para ulama tentang persetujuan anak gadis (perawan) dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Imam Malik

Imam Malik dalam kitab *Al – Muwato’* menyebutkan bahwa :

⁴⁴Ahmad Rofi’, *Op.Cit.h.*, 72 - 75

Malik mengatakan, demikian pendapat kami mengenai nikahnya para gadis perawan dan Malik mengatakan, gadis perawan belum berhak terhadap hartanya sehingga ia masuk rumahnya dan diketahui kondisinya ⁴⁵.

١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠

Mazhab Maliki dalam kaitan persetujuan dan kebebasan wanita dalam memilih pasangan (calon suami), imam Malik membedakan antara janda dengan gadis. Untuk janda harus ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Adapun gadis dan janda yang belum dewasa yang belum digauli oleh suaminya ada perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali di luar bapak. Bapak sebagai wali menurut beliau berhak memaksa anak gadisnya dan janda

⁴⁶*Ibid.*h., 726

yang belum dewasa (hak ijbar) untuk nikah, sedangkan wali selain bapak tidak mempunyai hak ijbar. Dengan kata lain, seorang bapak boleh menikahkan anak gadis dan janda yang belum dewasa walaupun tanpa persetujuan keduanya⁴⁷.

2. Abdullah bin Abdurrahman Al – Basam

Beliau berkata didalam kitab Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram disebutkan, wanita yang masih kecil atau belum baligh tidak diminta izin, sebab izinnya tidaki memberi manfaat terhadap akad nika⁴⁸.

3. Syekh Murtadha Al – Anshari

Dari mazhab Imamiyah sudah menyatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sah akad dikatakan dalam kitabnya yang berjudul Al – Makasib, bahwa pandangan yang polpuler dikalangan ulama mazhab Imamiyah mutakhir adalah bahwa andai kata orang yang dipaksa itu rela maka sahlah akadnya. Sementara itu Sayyid Abu Al – Hasan Al – Isfahani dalam al – Wasilahnya pada bab Al – Zawaj mengatakan bahwa, untuk sahnya akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai⁴⁹.

4. Ibnu Rusyd

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang perbedaan pendapat ulama tentang kebebasan wanita dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai berikut:

⁴⁷Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: AcademiaTazzafa, 2004), Cet. I, h., 70

⁴⁸Abdullah bin Abdurrahman Al – Basam, *Taudhih Al - Ahkam min Bulugh Al - Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h., 322 - 323

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al –Fiqh ‘ala Al – Madzahibil Al – Kamsah*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al – Kaff, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h., 316

1. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada persetujuannya.
2. Janda yang belum balig, menurut imam Malik dan imam Hanafi, wali boleh memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut imam Syafi'i wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.
3. Mengenai gadis kecil para imam mazhab sepakat bahwa ia boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Menurut Syafi'i yang boleh menikahkannya tanpa persetujuannya adalah bapak dan kakeknya, sedangkan imam Malik mengatakan yang boleh hanya bapaknya saja atau orang yang mendapat penyerahan dari bapak untuk melakukan akad itu jika calon suami telah ditentukan bapak, dan pendapat imam Hanafi adalah setiap orang yang mempunyai hak wali terhadap si gadis boleh menikahkannya walaupun tanpa persetujuannya, akan tetapi setelah dewasa si anak gadis mempunyai hak *khiyar* (memilih).
4. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan sendiri itu jika wanitanya gadis dewasa. Imam Malik dan imam Asy-Syafi'iberpendapat persetujuan hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah

dengan laki-laki pilihannya, sedangkan menurut imam Hanafi harus ada persetujuan dari si gadis⁵⁰.

5. Imam Hanafi

Dalam hal kebebasan wanita dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran terbukti bahwa menurut beliau seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta Qadhi untuk membatalkan perkawinan itu⁵¹.

6. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i membuat klasifikasi terkait dengan kebebasan wanita dan persetujuannya kepada tiga kelompok, yakni:

1. Gadis yang belum dewasa
2. Gadis dewasa
3. Janda.

Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah belum lima belas tahun (15) atau belum haid, maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa seizinnya, dengan syarat

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh ParaMujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. II, h., 398-404

⁵¹ Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Loc. Cit.*, h., 316

perkawinan itu menguntungkan bagi si anak gadis. Pandangan beliau ini didasarkan pada tindakan Abu Bakar yang menikahkan 'Aisyah kepada Nabi, dan umur Aisyah ketika itu baru sekitar tujuh tahun⁵².

Adapun perkawinan gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada mafhum mukhalafah hadis yang menyatakan, Janda lebih berhak terhadap dirinya. Menurut imam Asy-Syafi'i mafhum mukhalafah hadis ini bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya⁵³.

Dari penjelasan Asy-Syafi'i, akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak bapak sebagai wali masih melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung oleh ungkapan Asy-Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan (-)tetapi hanya sekedar pilihan (اختيار)⁵⁴.

7. Mazhab Hanabillah

Menurut Mazhab Hanabillah dalam al – Mugni Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari mazhab ini mengklaim, ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita itu senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri cenderung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju.⁵⁵ Menurut

⁵²Khoiruddin Nasution, *Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Op. Cit., h., 68

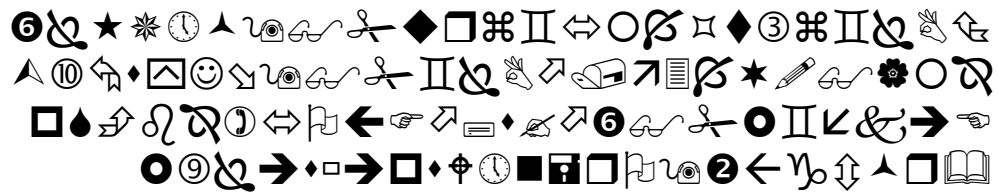
⁵³*Ibid.*, h., 69

⁵⁴*Ibid.*, h., 70

⁵⁵*Ibid.*, h., 71

beliau, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah firman

Allah dalam surat At – Talak ayat 4 yang berbunyi :



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan. (Q.S At – Talak: 4) ⁵⁶.

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa ‘iddah seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Dasar pendapat ini sesuai dengan hadis fi‘liNabi Saw :

- - هـ يهـ
) هـ - يهـ - ك - هـ - هـ - هـ
(

Artinya: Bahwa Rasulullah Saw. menikah dengan Aisyah RA. Ketika beliau berusia enam atau tujuh tahun dan beliau menggaulinya ketika

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h., 199

berusia sembilan tahun dengan dinikahkan oleh Abu bakar RA. (H.R. Muslim) ⁵⁷.

Menurut Ibnu Qudamah, disamping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, hadis ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari AbuBakr (bapak atau wali) kepada Aisyah.

Ibnu Rusyd dalam bukunya Bidayah al-Mujtahid, menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang perlu tidaknya persetujuan wanita dalam perkawinannya bermuara pada ‘illat yang dipakai oleh para ulama itu sendiri. Dalam kaitan ini ada dua ‘illat yang dipakai ulama sebagai dasar argumennya yang masing-masing ‘illat mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda. ‘Illat yang dimaksud adalah kegadisan seorang wanita dan kedewasaannya⁵⁸.

Ulama yang menggunakan ‘illat kedewasaan wanita sebagai dasar argumentasi, maka konsekwensi hukumnya adalah wanita dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah oleh siapa pun dan persetujuannya yang menentukan sah tidaknya suatu akad nikah. ‘illat inilah yang digunakan oleh imam Hanafi⁵⁹.

Ulama yang menggunakan ‘illat kegadisan wanita, maka konsekwensinya adalah gadis dewasa boleh dipaksa walinya (bapak) untuk

⁵⁷Imam an- Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an – Nawawi*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt.), h., 254

⁵⁸ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Penerjemah Abu Usamah Fathurrohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h., 403

⁵⁹*Ibid.* h., 404

menikah. Jadi persetujuannya bukanlah sesuatu yang menentukan. Imam Syafi'i menggunakan 'illat ini⁶⁰.

Ada yang menggunakan kedua 'illat tersebut sebagai satu kesatuan tanpa dipisah-pisah. Dengan kata lain, apabila 'illat kebelumdewasaan dan kegadisan masih melekat pada diri seorang wanita maka ia tetap bisa dipaksa untuk menikah. Menurut pendapat ini, persetujuan seorang wanita menentukan dalam perkawinannya ketika ia sudah berstatus janda dan dewasa. 'Illat digunakan oleh imam Malik⁶¹.

⁶⁰*Ibid.h.*, 405

⁶¹*Ibid.h.*, 405

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU QOYYIM AL – JAUZIYYAH

TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS

DALAM PERKAWINAN

A. Ibnu Qayyim Al – Jauziyah Sependapat Dengan Imam Abu Hanifah, Sedangkan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah Bermazhab Imam Hambali

Seperti biasanya bahwa ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat tentang sesuatu hal, maka langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengemukakan sejumlah dalil, kemudian mengambil hukum dari dalil tersebut.

Di dalam kitabnya yang berjudul *Zad al-Ma'ad* sebelum berbicara tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan ada sejumlah hadis yang beliau angkat, seperti tertulis dalam bukunya *Zad al-Ma'ad*.

Masalah persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah, ini juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah, karena menurut Imam Abu Hanifah dalam hal kebebasan wanita dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran terbukti bahwa menurut beliau seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai

konsekwensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta Qadhi untuk membatalkan perkawinan itu ⁶².

Sedangkan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah dalam masalah persetujuan anak gadis dalam pernikahan dengan Gurunya sendiri yaitu Ibnu Taimiyyah yang sama – sama bermazhab Imam Hambali tidak sepakat. Karena Ibnu Taimiyyah dan Mazhab Hanabillah dalam al – Mugni Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari mazhab ini mengklaim, ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita itu senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri cenderung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju. ⁶³

Menurut beliau, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah firman Allah dalam surat At – Talak ayat 4 yang berbunyi :



 Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang

⁶²Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al –Fiqh ‘ala Al – Madzahibil Al – Kamsah*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al – Kaff, (Jakarta: Lentera Hati, 2004),h., 316

⁶³*Ibid.*, h., 71

masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan. (Q.S At – Talak: 4)⁶⁴.

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa 'iddah seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Dasar pendapat ini sesuai dengan hadis fi'liNabi Saw :

- - هـ يه
) هـ - هـ - - - هـ هـ
(

Artinya: Bahwa Rasulullah Saw. menikah dengan Aisyah RA. Ketika beliau berusia enam atau tujuh tahun dan beliau menggaulinya ketika berusia sembilan tahun dengan dinikahkan oleh Abu bakar RA. (H.R. Muslim)⁶⁵.

Menurut Ibnu Qudamah, disamping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, hadis ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari AbuBakr (bapak atau wali) kepada Aisyah.

Adapun alasan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah dinukil melalui jalur shohih dari beliau dalam Ash – Shahihain bahwa Khansa' bintu Khidam dinikahkan oleh bapaknya, tetapi dia benci hal tersebut dan ketika itu dia

⁶⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h., 199

⁶⁵Imam an- Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an – Nawawi*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt.), h., 254

Perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta izin. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, Kalau dia diam (H.R Mutafa' 'alaih)⁶⁸.

Dalam shahih Muslim :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْإِيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ﷺ . ()

Artinya: Menceritakan kepada kami Said bin Mansyur, Qutaibah bin Said merea berkata, menceritakan kepada kami Malik dan menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, telah berkata kepada Malik, telah menceritakan kepadamu Abdullah bin Fadhl dari Nafi' bin Jabir dari Ibnu Abbas, Bahwasanya Nabi Saw. bersabda, Janda lebih berhak dengan dirinya dari pada walinya, dan perawan diminta izin terhadap dirinya dan izinnya adalah diamnya (H.R Muslim)⁶⁹..

Dari rangkaian nash di atas Ibnu Qayyim Al - Jawziyyah berpendapat bahwa hukum yang diambil dari sana adalah seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur Salaf dan mazhab Abu Hanifah serta satu riwayat dari imam Ahmad. Juga pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah Saw., baik dalam bentuk perintahnya maupun

⁶⁸Muhammad Fua'd Abdul Haq, *Al - Lu'lu' Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al - Fikri, tt), h., 569

⁶⁹Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), h., 423

larangannya, atau dalam kaidah-kaidah syari'ah maupun kemaslahatan umatnya⁷⁰.

Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Hadis ini diriwayatkan secara mursal bukan karena adanya 'illat, melainkan memang memiliki status musnad dan mursal. Bila mengikuti pendapat Fuqaha', bahwa menjadikan status hadis ini merupakan ziyadah (tambahan), maka orang yang menjadikan hadis tersebut muttasil jelas lebih didahulukan daripada yang menjadikannya berstatus mursal. ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam tradisi Hadis. Bila menilai Hadis tersebut mursal seperti sebagian besar ahli Hadis, memang hadis tersebut benar-benar berstatus mursal. Akan tetapi didukung Hadis shahih lain, qiyas dan kaidah – kaidah syara'⁷¹.

Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Berdasarkan hadits diatas Ibnu Qoyyim Al – Jauziyyah berpendapat bahwa konsekuensi keputusan ini bahwa seorang perawan yang sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah dan dinikahkan kecuali dengan kiridhaannya. Ini pula yang sesuai dengan

⁷⁰Ibnu Qoyyim Al – Jauziyyah, *Zaadul Al – Ma'ad Fi Hadyii Khairul Ibaad*, (Bairut: Ar – Risalati – Nasyirun, tt). h., 775

⁷¹*Ibid.*, h., 776

keputusan Rasulullah Saw. perintah beliau dan larangan beliau, kaedah – kaedah syariat beliau dan kemaslahatan umat beliau⁷².

1. Kesesuaian permintaan izin dengan perintah beliau Saw

Adapun kesesuaian pendapat yang mengharuskan memintaizin, dengan perintah beliau, maka sungguh beliau telah bersabda, Perawan harus diminta izin, dan ini adalah perintah yang diberi penekanan karena ia harus disebutkan dalam bentuk berita yang menunjukkan ia benar – benar terjadi, nyata dan eksis. Sementara hukum asal dari perintah – perintah beliau Saw. adalah wajib selama tidak ada ijma' yang menyelisihkannya⁷³.

2. Kesesuaian perintah izin dengan Larangan beliau Saw

Adapun kesesuaian dengan larangan beliau, didasarkan kepada sabda beliau, Perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta izin. Maka beliau telah memerintahkan dan melarang, memutuskan wanita boleh memilih dan ini adalah penetapan hukum dengan metode yang paling kuat⁷⁴.

3. Kesesuaian permintaan izin dengan kaedah – kaedah syari'at

Adapun kesesuaian dengan kaedah – kaedah syariat beliau, karena perawan yang sudah baligh (dewasa), berakal dan sudah bisa mengetahui yang baik, bapaknya tidak memiliki hak untuk mempergunakan sedikitpun dari pada hartanya kecuali dengan keridhaannya dan bapak tidak boleh memaksanya untuk mengeluarkan hartanya walaupun sedikit tanpa keridhaannya. Maka bagaimana sehingga bapak diperbolehkan

⁷²Ibnu Qoyyim Al – Jauziyyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akherat*, Tahkiq Abdul Qadir Al – Arna'uth dan Syuaib Al – Arna'uth, (Jakarta: Grilya Ilmu, 2006), h.,113

⁷³*Ibid.*, h.,113

⁷⁴*Ibid.*, h., 113

Adapun kesesuaian dengan maslahat umat, maka tidak tersembunyi maslahat yang didapatkan oleh wanita ketika dia menikah dengan calon yang dia pilih lagi dia ridha, dimana terwujud tujuan – tujuan pernikahan untuknya. Akan terjadi sebaliknya kalau dia menikah dengan orang yang dia benci dan jauh. Seandainya sunnah yang tegas tidak menerangkan hukum ini, niscaya kias yang sahih serta kaedah – kaedah syariat tidak mengharuskan selain hukum ini ⁷⁸.

⁷⁸*Ibid.114*

B. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Ibnu Qayyim Al - Jauziyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan

Ibnu Qayyim al - Jauziyah berbeda pandangan dengan ulama - ulama lainnya tentang urutan dasar istinbat hukum. Menurutnya, urutan dasar istinbat hukum seperti dikutip Abdul Fatah Idris dalam bukunya yang berjudul, "Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al - Jauziyah" sebagai berikut ⁷⁹:

1. Nash (Al - Qur'an dan Sunnah)

Nash yang dimaksud oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah. Menurutnya seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash. Apabila ia mendapatkan nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.⁸⁰ Untuk memperkuat pandangan tersebut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah mengemukakan bukti dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki - laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah

⁷⁹ Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al - Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h., 39

⁸⁰ Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), Juz. I, h., 9

*dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S Al –Ahzab: 36)*⁸¹.

Menurut Ibn Qayyim al - Jawziyyah, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak dibenarkan mengambil alternatif hukum yang lain sesudah Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum, dan barang siapa mengambil alternatif lain, maka ia berada dalam kesesatan yang nyata⁸².

Ibnu Qayyim al - Jawziyyah mendahulukan teks - teks Hadis sebagai dasar atau sumber hukum daripada Ijma', ra'yu, maupun qiyas (analogi). Selanjutnya Ibnu Qayyim al - Jawziyyah menjelaskan posisi as - sunnah terhadap al - Qur'an yang menurutnya ada tiga fungsi yakni, As - sunnah menguatkan ketentuan - ketentuan yang ada dalam al - Qur'an, As - sunnah menjelaskan al - Qur'an dan sekaligus tafsir baginya; dan As - sunnah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum⁸³.

2. Fatwa atau Ijma' Sahabat

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Saw. dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw⁸⁴.

Adapun landasan atau dasar hukum dari ijma' atau fatwa sahabat adalah Hadits Rasulullah Saw :

مِنْ أَهْلِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ

يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ :

⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'anul Karim*, (Semarang:Toha Putra, 1989), h., 567

⁸²Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Op.Cit.*, h., 10

⁸³*Ibid.*h., 10

⁸⁴Hudori Bek, *Tarikh Tasrik*, (Beirut: Darul Al – Fikri, tt), h., 54

: . : : .

: أَجْتَهَدَ رَأْيِي وَلَا أَلُوْ .

:

(يَرْضَى رَسُوْلُ اللهِ)

Artinya: Dari Annas, dari sekelompok penduduk Homs dari sahabat Muaz bin Jabal Bahwasanya Rasulullah Saw. ketika bermaksud mengutus Muza ke Yaman, beliau berkata, apabila dihadapkan kepadamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?. Muaz menjawab, Saya akan memutuskannya berdasarkan Al Qur'an. Nabi bertanya lagi, Jika kasus itu tidak anda temukan dalam Al – Qur'an?. Muaz menjawab, saya memutuskan berdasarkan sunnah rasulullah. Lebih lanjut nabi bertanya, Jika kasusnya tidak terdapat dalam sunnah rasul dan Al- Qur'an?. Muaz menjawab, Aku akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk dada Muaz dengan tangannya seraya berkata, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhainya. (HR. Abu Daud) ⁸⁵.

Apabila ada fatwa para sahabat yang diketahui saling bertentangan, seorang mujtahid tidak boleh mengambil fatwa mereka untuk dijadikan sebagai dasar hukum, sebab fatwa mereka itu tidak bisa dikatakan ijma' sahabat lagi. Ibnu Qayyim al - *Jawziyyah* dalam menerapkan hukum selain di atas jarang menggunakan kata ijma' sesuai ungkapan - ungkapannya atau tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya⁸⁶ :

3. Usaha Mengkompromikan Pendapat Sahabat yang Saling Bertentangan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al - Qur'an dan hadits. Apabila pendapat mereka tidak

⁸⁵Abdurrahman Jamil, *Filsafat Hhukum Islam*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999), h., 17 - 18

⁸⁶Abdul Fatah Idris, *Op.Cit.* h., 42

bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing - masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum⁸⁷.

Mayoritas ulama mengakui fatwa Shahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan Salaf, dan fatwa-fatwa para Shahabat. Fatwa mereka lebih utama daripada fatwa ulama kontemporer.⁸⁸ Karena fatwa para Shahabat lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul. Imam Asy-Syafi'i dalam qawl qadim seperti dikutip al-Baihaqi, mengatakan bahwa semua Shahabat berada di atas kita dalam hal kualitas keilmuan, ijtihad, wara', dan intelektualnya. Menurut pendapat mereka lebih mulia dan lebih utama daripada pendapat kita secara keseluruhan⁸⁹.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Di antara orang - orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang - orang munafik dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kami-lah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka

⁸⁷ Abdul Fatah Idris, *Op.Cit.*, h., 43

⁸⁸ Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Op.Cit.h.*, 10

⁸⁹ *Ibid.*, h., 10

*akan dikembalikan kepada azab yang besar. (Q.S At – Taubah:100)*⁹⁰.

4. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if⁹¹

Hadits mursal adalah hadits yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabiin⁹². Hadits dha'if, adalah hadis mardud, yaitu hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata al-dha'if, secara bahasa adalah lawan dari al-qawiy, yang berarti lemah⁹³.

5. Qiyas dalam Keadaan Darurat

Ketika tidak ditemukan pada nas, hadits atau salah satu diantaranya dan juga tidak ditemukan didalam atsar, hadits daif dan hadits mursal maka, sumber yang kelima yang dipakai adalah Qiyas ketika dalam keadaan darurat⁹⁴.

Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup setelah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur, dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka ragam. Semua itu adalah qiyas aqli, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa⁹⁵.

Adapun istinbat hukum Ibnu Qayyim Al - Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan adalah berdasarkan pada :

⁹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'anul Karim, Op.Cit*, h., 75

⁹¹Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in, Lok.Cit.*, h., 10

⁹²Abu Al Maira, *Mustalahul Hadits*, (Jakarta: Darul Suudiyah, 1998), h., 12

⁹³*Ibid.*, h., 16

⁹⁴Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in, Op.Cit.*, h., 26

⁹⁵*Ibid.*, h., 27

1. Nash Hadits

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, At – tirmidzi, Abu Daud dan An – Nasa’i dari Abu Hurairah ⁹⁶.

حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري :

حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمه حدثنا ابو هريرة

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

رسول الله وكيف اذنها ؟ قال : (متفق عليه).

Artinya: Menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Quwariri , menceritakan kepada kami Khalid bin Harits, menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir, menceritakan kepada kami Abu Salamah, menceritakan kepada kami Abu Hurairah, Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta izin. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana izinnnya? Beliau menjawab, Kalau dia diam (H.R Mutafa’ ‘alaih) ⁹⁷.

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Malik dalam Muwatto’, At – tirmidzi, Abu Daud dan An – Nasa’I dari Ibnu Abbas ⁹⁸.

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة ابن سعيد قالوا : وحدثنا يحيى بن يحيى قال

: حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الايم احق بنفسها من وليها

تستأذن في نفسها واذنها صماتها ()

⁹⁶Lihat Ibnu Qoyyim Al – Jauziyyah, *Zadul Ma’ad Bekal Perjalanan Akherat*, Tahkiq Abdul Qadir Al – Arna’uth dan Syuaib Al – Arna’uth, (Jakarta: Grilya Ilmu, 2006), h.,112

⁹⁷Muhammad Fua’d Abdul Haq, *Al – Lu’lu’ Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al – Fikri, tt), h., 569

⁹⁸Ibnu Qayyim, *Op.Cit.*, h., 113

Artinya: Menceritakan kepada kami Said bin Mansyur, Qutaibah bin Said merea berkata, menceritakan kepada kami Malik dan menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, telah berkata kepada Malik, telah menceritakan kepadamu Abdullah bin Fadhl dari Nafi' bin Jabir dari Ibnu Abbas, Bahwasanya Nabi Saw. bersabda, Janda lebih berhak dengan dirinya dari pada walinya, dan perawan diminta izin terhadap dirinya dan izinnya adalah diamnya (H.R Muslim)⁹⁹.

2. Qias (analogi)

Ibnu Qayyim al - Jawziyyah lebih lanjut memberikan analogi bahwa seorang bapak tidak memiliki hak tasarruf terhadap harta milik anak gadisnya yang rasyidah (baligh, (dewasa), berakal dan sudah bisa mengetahui yang baik) tanpa persetujuannya, apalagi terhadap budu'nya (kehormatannya) yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu, bagaimana mungkin seorang bapak dibolehkan mentasarrufkan harta yang paling berharga tersebut sementara si gadis tidak setuju¹⁰⁰.

C. Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan

⁹⁹Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), h., 423

¹⁰⁰Ibnu Qoyyim Al - Jawziyyah, *Op.Cit.h.*, 777

Secara ideal - normatif, Islam sesungguhnya tidak membedakan antara pria dengan wanita, atau dengan kata lain Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang berbau gender. Islam sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan bagi seluruh alam (rahmatan lil'alam) menempatkan derajat dan posisi wanita pada kedudukan yang mulia ¹⁰¹.

Wanita sebagai kenyataan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, menjadi salah satu golongan yang ingin dibela al - Qur'an, disamping kelompok budak, kaum fakir miskin, anak - anak miskin, dan sederet kaum lemah lainnya. Bahkan al - Qur'an secara khusus mendokumentasikannya dalam satu surat khusus yang bernama An - Nisa' ¹⁰².

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan para ulama dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang persoalan ini.

Salah satu bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam memilih pasangan adalah 'illat yang dijadikan sebagai dasar argumen untuk menentukan ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri. Sebagian ulama dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (al-bikr) sebagai 'illat dalam penentuan hukumnya, sementara ulama yang lain dengan menggunakan 'illat

¹⁰¹ Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Maslahat Sebagai Kerangka Acuan Syari'ah, (Jakarta : Ulumul Qur'an, 1995), Vol. 4: 3, h., 94

¹⁰² Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasung Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h., v

masa kecil (as - sugr), bahkan ada ulama yang menjadikan ‘illat bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua ‘illat tersebut¹⁰³.

Dalam kasus ini, ada kritikan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak wanita adalah bertentangan dengan prinsip Islam, dan menjadikan hal itu sebagai ‘illat untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita merupakan pembuatan ‘illat dengan sesuatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara¹⁰⁴. Beliau menambahkan bahwa ‘illat yang benar untuk kasus ini adalah masih kecil.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah sependapat dengan gurunya Ibnu Taimiyyah bahwa ‘illat yang dijadikan sebagai pijakan hukum ada tidaknya hak tersebut adalah ‘illat usia kecil, sehingga menurut beliau gadis yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih calon suaminya. Dengan kata lain tidak seorang pun yang bisa memaksanya untuk menikah.

Bagian lain yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama dalam kaitan ini adalah metode para ulama dalam mengistinbatkan hukum pada kasus ini. Dengan metode istinbat hukum yang berbeda tersebut berimplikasi kepada penetapan hukum yang berbeda pula walaupun pada dasarnya nash yang digunakan sama. Metode istinbat hukum yang digunakan para ulama ada dua macam dalam hal ini yaitu mafhum mukhalafah dan mantuq nas.

¹⁰³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. II, h., 403- 404

¹⁰⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. II, h., 471

Mafhum mukhalafah sebagai pisau analisis digunakan oleh imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali terhadap kasus ini, membawa mereka pada pendapat bahwa persetujuan anak gadis hanya sekedar sunat dengan berdasarkan hadis :

الایم ا ه یَّ ()¹⁰⁵

Jika janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka mafhum mukhalafahnya adalah wali lebih berhak terhadap diri anak gadisnya, sehingga kemudian mereka berpendapat meminta persetujuan seorang gadis tidak diperlukan lagi.

Dengan hadis yang sama pula ulama yang berpegang pada mantuq nas diwakili oleh imam Hanafi dan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis adalah wajib.

Ibnu Qayyim lebih lanjut mengkritik golongan yang menggunakan mafhum mukhalafah terhadap kasus ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang muncul dari mantuq nas semestinya didahulukan daripada pemahaman yang menggunakan mafhum mukhalafah. Sebab penetapan hukum suatu kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya untuk kasus lainnya. Adalah sesuatu yang mungkin kasus lain mempunyai dasar hukum sendiri¹⁰⁶.

Perbedaan pendapat berkenaan dengan persoalan persetujuan gadis dalam perkawinan, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut memberikan

¹⁰⁵ Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Op.Cit.*

¹⁰⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 92

analogi bahwa seorang bapak tidak memiliki hak tasarruf terhadap harta milik anak gadisnya yang rasyidah tanpa persetujuannya, apalagi terhadap budu'nya (kehormatannya) yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu, bagaimana mungkin seorang bapak dibolehkan mentasarrufkan harta yang paling berharga tersebut sementara si gadis tidak setuju.

Pada akhirnya persolan pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam memilih calon suami, bermuara pada apakah perlu (wajib) atau tidak (sunnah).

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah sebagai salah satu ulama besar dalam lingkungan mazhab Hanbali, dalam menyikapi persoalan ini lebih sepakat dengan pandangan Abu Hanifah. Beliau berpendapat dalam hal ini sebagai sesuatu yang diperlukan (wajib). Dengan pertimbangan kemaslahatan gadis yang bersangkutan, maka hal ini diserahkan sepenuhnya kepada si gadis dan bukan kepada wali¹⁰⁷.

Ibnu Qayyim meyakini bahwa maksud ditaklifkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu, implemenatasi hukum berdasarkan pada maslahat. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat¹⁰⁸.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam

¹⁰⁷Ibnu Qoyyim Al – *Jauziyyah, Zaadul Al – Ma'ad Fi Hadyii Khairul Ibaad*, (Bairut: Ar – Risalati – Nasyirun, tt), h., 3

¹⁰⁸*Ibid.*, h., 111

yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan:

1. Banyak ketentuan - ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia.
2. Kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam ¹⁰⁹.

Pendapat Ibnu Qayyim al - Jawziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis sesungguhnya sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang - undang perkawinan nomor 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.

Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing - masing calon suami istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar - benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan hak kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai ¹¹⁰.

Bisa dilihat bahwa apa yang menjadi pendapat dari Ibnu Qayyim sejalan dengan perundang - undang di Indonesia, bahkan boleh dikatakan bahwa maslahat yang dicita - citakan oleh beliau lebih disempurnakan lagi oleh perundang - undangan di Indonesia.

¹⁰⁹ Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), Cet.I, h., 231

¹¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet.IV, h., 73-74

Ibnu Qayyim Al - Jawziyyah la sangat dekat dengan Syekh al - Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. Ia terkenal gigih dalam membela dan menyebarluaskan pemikiran - pemikiran gurunya itu. Ibnu Qayyim, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini. Dalam menyampaikan kebenaran yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya dari apa yang dialami oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan ¹¹¹. Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersifat pembaharuan. Tak terkecuali dalam bidang Tasawuf. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menghendaki agar Tasawuf dikembalikan ke sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan as-sunnah dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ajaran-ajaran Tasawuf seharusnya memperkuat Syari'at dengan itu beroleh kesegaran dan penghayatan hakiki yang tumbuh dari kedalaman batin manusia¹¹².

Gelora pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang tegas dengan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat, dapat dipahami apabila kita melihat situasi dan kondisi masyarakat dimana Ibn Qayyim al-Jawziyyah hidup. Di timur Hulaghu Khan datang mengobrak-abrik umat Islam dan dari barat kekuatan-kekuatan yang

¹¹¹*Ibid.h.*, 374

¹¹²M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, h., 222

membentuk perang salib, sementara Aqidah dan pemikiran umat Islam dalam keadaan beku (*jumud*) dibalut oleh lumpur taklid, khurafat dan bid'ah.¹¹³

Pendapat yang ditimbulkan di zaman disintegrasi bahwa pintu Ijtihad telah ditutup dan diterima secara umum di zaman tersebut. Disamping itu, pengaruh tarekat-tarekat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Demikianlah kehidupan yang melanda orang Islam pada masa itu, penuh dengan bentrokan fisik dan perpecahan sesama mereka, disebabkan mereka menyimpang dari ajaran agama.

Keadaan seperti ini membutuhkan terjadinya perubahan dan pembaharuan kesempatan seperti inilah yang paling tepat untuk mengajak dan mengarahkan bangsa kembali kepada ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong Ibn Qayyim al-Jawziyyah untuk menegaskan dakwah perdamaian, mempersatukan paham Aqidah dan Fiqh, membuang pertikaian sesama orang Islam serta membuka kembali pintu ijtihad dengan tetap atau selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as – sunnah¹¹⁴.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perundang - undangan yang mengatur tentang batasan usia pria maupun wanita yang boleh untuk menikah, dalam perundang - undangan itu tersebut secara jelas disebutkan bahwa batas usia untuk pria 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka calon suami istri yang telah matang jiwanya agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan harmonis, dan diharapkan tidak berakhir dengan perceraian.

¹¹³*Ibid.h.*, 223

¹¹⁴*Ibid.*, .h., 225

Kematangan usia diperlukan, karena berdasarkan pengamatan dan analisis berbagai pihak terhadap kasus-kasus tidak harmonis dan bubarnya sebuah rumah tangga, seringkali disebabkan oleh ketidak matangan usia dan ketidakstabilan integritas pribadi, sehingga sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam bahtera rumah tangga.

Dari perspektif maqasid asy - syari'ah, konsep maslahah sangat relevan dengan dimensi pluralitas dan dinamika kehidupan manusia. Sebab dengan konsep maslahah, bukan hanya konsep sisi perubahan dan perubahan perkembangan zaman saja yang bisa dianulir, melainkan aspek lokalitas dan pluralitas juga tidak terabaikan, sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bahwa dimensi maslahat yang ingin dicapai dalam masalah tasyri'i adalah maslahah yang bersifat umum (maslahah al – ammah). Pada dasarnya mayoritas ahli usul fiqh menerima metode maslahah mursalah. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut :

1. Maslahah tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan *relevan (munasib)* dengan kasus hukum yang ditetapkan.
2. Maslahah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (*raf'ul al – haraj*), dengan cara menghilangkan *massaqqat* dan *madharrat*.

3. Masalah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqashid al – syari’at*), dan tidak bertentangan dengan dalil *syara’* yang *qath’i*¹¹⁵.

Maslahah secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha’ harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya tidak bertentangan dengan tujuan syari’ah itu sendiri¹¹⁶.

Dengan konsep maslahah sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial¹¹⁷.

¹¹⁵Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h., 142

¹¹⁶ M. Hasby asy-Syiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.V, h., 337

¹¹⁷ Thobieb al-Asyhar, *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta, Fkku Press, 2003), Cet.III, h., 104

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Qayyim al- Jawziyyah berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahnya.
2. Sementara mayoritas fuqaha' berpendapat persetujuan gadis hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah.
3. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kasus ini berpegang kepada *mantuq nas* yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat masa kecil (*as-sugr*), sedangkan mayoritas fuqaha' berpegang kepada *mafhum mukhalafah* yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat *al-bikr*.
4. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1)) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jawziyyah.

B. Saran-Saran

1. Dalam memahami persoalan persetujuan anak gadis dalam pernikahannya hendaknya tidak dipahami secara *parsial* sehingga pemahaman yang muncul sesuai dengan cita-cita syari'ah untuk mewujudkan masalah di tengah-tengah manusia dapat dirasakan.
2. Penelitian berkaitan dengan persetujuan anak gadis dalam pernikahannya sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Ar - Ruzz Press, 2002), Cet.I.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet.IV.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. III.
- Abu Malik Kamal bin As - Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Abdullah bin Abdurrahman Al – Basam, *Taudhih Al - Ahkam min Bulugh Al - Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H).
- Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al - Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007).
- Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi agama, 1985).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004).
- , *Al – Qur'anul Karim*, (Semarang: Toha Putra, 1989).
- , *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001).
- , *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimmas dan Penyelenggara Haji, 2003).
- , *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005).

- Drs. Moh Rif' ai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978).
- Imam Malik bin Anas, *Al – Muwato'*, penerjemah Nur Alim, Asep Saefullah dan Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al - Mujtahid Wa Nihayah Al - Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. II.
- Imam an - Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an – Nawawi*, (Beirut: Dar al - Fikr, tt.).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah Abu Usamah Fathurrohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ibnu Qoyyim Al – *Jauziyyah, Zaadul Al – Ma'ad Fi Hadyii Khairul Ibaad*, (Bairut: Ar – Risalati – Nasyirun, tt).
- , *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akherat*, Tahkiq Abdul Qadir Al – Arna'uth dan Syuaib Al – Arna'uth, (Jakarat: Grilya Ilmu, 2006).
- , *I'lam al - Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al - Kutub al - 'Ilmiyyah, 1991), Juz. I.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al - Mujtahid Wa Nihayah Al - Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. II.
- Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004).
- Mahmud Asy - Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), Cet. III.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Undang - Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.).
- Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin HS., (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Cet. III.
- M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1996), Cet. I.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005).

- Muhammad Nasiruddin Al – Albani, *Mukhtasor Shohih Bukhori*, (Riyad: Pustaka Al – Ma’arif, tt).
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al –Fiqh ‘ala Al – Madzahibil Al – Kamsah*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al – Kaff, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- Masdar F. Mas’udi, *Meletakkan Masalah Sebagai Kerangka Acuan Syari’ah*, (Jakarta : Ulumul Qur’an, 1995), Vol. 4:3.
- M. Hasby asy - Syiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.V.
- Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasunga Bias Laki - Laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Pustaka Yustisia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al - Fikr, tt), Juz.II.
- Syaikh Al – Amam Muhamamd bin Abdurrahman Ad – Damsyqi, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyim, 2012), Cet. III.
- Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al - Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Enam Puluh Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).
- Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al - Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arabiyah, tth), Juz.II.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992).
- Thobieb al - Asyhar, *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta, Fkku Press, 2003), Cet.III.
- Wahbah al - Zuhaily, *Al -Fiqh al - Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus:Dara al - Fikr, tt), Juz VII.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa - Fatwa Kontemporer*, alih bahasaAs’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. II.

BIOGRAFI PENULIS



Tito Hartoto alias Tito lahir di Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 13 Mei 1989. Tito merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan dari suami istri Muslim dan Hafsyah (Alm). Riwayat pendidikan Sekolah Dasar Negeri 003 Kecamatan Tebing Tinggi (1996 - 2002),

kemudian melanjutkan MTSN Al - Furqon Tebing Tinggi (2002 - 2005), dan MAN Tebing Tinggi (2005 - 2008). Setelah lulus dari MAN Tebing Tinggi, pada tahun yang sama Tito melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Selama duduk di bangku kuliah, Tito tidak hanya mengikuti program perkuliahan saja akan tetapi, aktif di berbagai Organisasi kemahasiswaan baik yang interen maupun eksteren kampus mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Al-Syakhsyah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Kemudian Tito melaksanakan kuliah kerja nyata (KUKERTA) di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk

bersosialisasi dan berbaur dalam kehidupan masyarakat secara nyata terhitung sejak 1 Juli sampai 26 Agustus 2011. Selama dalam kegiatan tersebut, Tito dipercaya sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) Ukui.

Dipertengahan semester IX, Tito mulai fokus untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) di bawah bimbingan Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag. Al-hasil pada semester X, Tito dinyatakan lulus dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum tepatnya pada tanggal 20 Mei 2013. Tito menyelesaikan masa Study perkuliahan selama 4 tahun 10 bulan dan memperoleh IPK terakhir 3,34 dengan predikat sangat memuaskan.

